

UPAYA MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN AGAR DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA dan BERNEGARA

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.binsarhutabarat.com

Internet Source

2%

2

ikhsansusilo12.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

UPAYA MEWUJUDKAN
IMPLEMENTASI NILAI
KESELARASAN DAN NILAI
KEADILAN AGAR DAPAT
MENINGKATKAN KUALITAS
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA dan BERNEGARA

by Nany Suryawati

Submission date: 07-Jul-2021 07:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 1616550745

File name: PAPER_BOOKCHAPTER_ESAI_LEMHANNAS_2021.docx (29.49K)

Word count: 3322

Character count: 23339

**UPAYA MEWUJUDKAN
IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN
AGAR DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA dan BERNEGARA**

Nany Suryawati

nany.suryawati@ukdc.ac.id

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Nilai adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang pasti baik dan benar, yang dipilih dengan kesadaran akan diri sebagai manusia yang memiliki akal dan budi. Budi inilah yang mendasari pemilihan akan suatu nilai. Nilai-nilai yang hidup dalam kelompok manusia, dalam suatu kedinamisan, menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan tempat manusia menjalani kehidupan. Adanya hubungan antar manusia inilah yang menjadi dasar dari keberlanjutan kelompok manusia itu, karena dengan mengutamakan nilai-nilai yang baik, kelompok ini dapat hidup dalam kebersamaan, aman dan damai. Apabila terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai yang baik ini, maka dapat menimbulkan rasa malu atau bersalah. Nilai-nilai yang baik ini diwujudkan dalam sikap, perilaku dan tindakan setiap manusia. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang mengandung prinsip-prinsip moral dan etika, menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini adalah : Nilai Religius, Nilai Kekeluargaan, Nilai Keselarasan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan. Kelima Nilai merupakan Nilai-Nilai Kebangsaan, yang terkandung dalam Sila-sila dari Pancasila, dasar negara Indonesia; Negara Indonesia memiliki wilayah sedemikian luas, dengan beragam adat kebiasaan dan budaya, memerlukan adanya penerimaan terhadap keberagaman ini. Keberagaman yang berasal dari budaya setempat dengan kearifan lokal-nya, membutuhkan kesadaran kolektif, melalui Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan dalam berperilaku, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan ini dapat menyatukan semua potensi yang ada, untuk meningkatkan kualitas bangsa, agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), dapat tercapai, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Nilai-Nilai, Nilai Keselarasan, Nilai Kadilan.

PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia perjalanannya cukup panjang, dimulai dari masa penjajahan, sampai kemerdekaan, dan sekarang masa pengisian kemerdekaan. Tuntutan jaman pada masa globalisasi ini, membutuhkan tanggapan dari bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam suatu jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi suatu kekuatan yang mampu mendorong terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam suatu wadah nusantara.¹ Nilai-nilai perjuangan ini mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Globalisasi turut mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam aspek sosial, hak asasi, demokrasi, ekonomi dan politik. Perjuangan menghadapi ‘Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan’ (ATHG), membutuhkan semangat dan kekuatan mental spiritual yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari ATHG tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka negara mengatasi segala masalah dari golongan, kelompok, dan perorangan dalam segenap aspek kehidupan, dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan, kelompok dan perorangan, berdasarkan aturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan hak asasi manusia, aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini.² Berpangkal tolak pada sudut pandang bangsa dalam menanggapi segala hal yang berhubungan dengan kehidupannya, maka nilai-nilai yang berkembang dari nilai-nilai perjuangan, menjadi nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut dijadikan pegangan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Kebangsaan

Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari empat (4) konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu : Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), digali dari sejarah perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia, sehingga memamsuki gerbang kemerdekaan menjadi Negara Indonesia.

Kesatuan berarti ‘ikatan yang menjadi satu’ dari wilayah Sabang samapai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dihubungkan laut dan daratan merupakan satu kesatuan yang

1. Made Warka, 2011, *Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI*, Yogyakarta, Andi, h. 1.

2. Ibid, h.49

utuh, tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini meliputi kesatuan ideologi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kata 'bangsa' mempunyai makna adanya kumpulan berbagai kelompok yang berbeda, yang menyatakan diri menjadi satu bangsa. Adanya semangat untuk bersatu menjadi satu kesatuan dalam kelompok, wilayah dan ideologi, mencerminkan kebesaran bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia adalah tanah air dan tanah tumpah darah bangsa Indonesia, yang megandung makna kesadaran akan keutuhan wilayah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama bangsa Indonesia untuk melestarikan, menjaga keseimbangan dengan alam, mengelola dengan bijak, dengan memperhatikan kepentingan generasi berikutnya, serta melindungi dan mempertahankan wilayah ini dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, maka setiap individu bangsa Indonesia, dimanapun berada, wajib membela tanah air dan tanah tumpah darahnya ini, demi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Nilai Keselarasan

Setiap manusia Indonesia mengakui dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Adanya perbedaan agama dan kepercayaan ini menciptakan keadaan yang mencerminkan adanya saling pengertian, saling menghargai dan saling mempercayai serta adanya suasana kekeluargaan, kedamaian, ketentraman dan persahabatan, dalam hidup bersama.³

Nilai-nilai ini berkembang dalam diri manusia Indonesia, yang didasari sikap pengendalian diri, tidak mementingkan diri sendiri, dan lebih mengutamakan kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama, sehingga nilai keselarasan ini mendasari kehidupan bersama dalam wadah nusantara. Kesadaran akan kebersamaan dalam satu wadah, yaitu wilayah Negara Indonesia, dengan keragaman budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Adanya kondisi yang berbeda-beda ini, dengan lingkungan geografis yang berbeda pula, maka masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai. Menghormati keberagaman ini akan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.⁴ Nilai-nilai ini

3. Soeprapto, 1996, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Citraluhur Tatamandiri, h.6.

4. Sri Widayati, 2009, *Wawasan Nusantara*, Jakarta, CV Pamularsih, h.18.

terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila dapat menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kemajemukan bangsa untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia bangsa Indonesia,⁵ melalui keselarasan dalam keberagaman. Keberagaman ini menjadi dasar nilai-nilai kebaikan dalam wujud etika dan kearifan lokal, sebagai kekuatan dalam membangun dan menjaga keselarasan (harmoni) hubungan antar elemen dalam masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang rukun, tentram dan damai.⁶ Saling menghormati, saling menghargai, merupakan dasar dari keselarasan hubungan antar manusia Indonesia. Nilai keselarasan ini mengandung semangat kebersamaan karena hidup bersama dalam suatu wilayah yang satu dan berdaulat, yang wajib di pertahankan dan dijaga kelestarian serta keberlanjutannya. Kemampuan menjaga keselarasan atau keharmonisan ini, akan mendorong terciptanya semangat untuk mengisi kemerdekaan melalui kerjasama dalam irama yang sama, demi terwujudnya pembangunan di segala bidang.

C. Nilai Keadilan

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai yang memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan suku, agama dan sebagainya. Kewajiban manusia untuk memperlakukan setiap orang dengan perlakuan yang sama, sehingga tampak nilai keadilan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan terkandung dalam Pancasila, sebagai 'roh' dari Pancasila, menjadi dasar pembentukan suatu peraturan hukum dan sistem hukum, sehingga sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan bagi masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.⁷ Keadilan mendorong kepada sikap hidup yang senantiasa menajamkan kepedulian terhadap sesama, karena dengan keadilan yang merata, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri, tidak mudah diatur atau dikendalikan oleh bangsa atau kekuatan asing.⁸

Sedangkan hukum sebagai pengayom yang melindungi manusia dari tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak individu setiap orang. Pengayoman ini merupakan perwujudan nilai keadilan yang diberikan kepada setiap manusia tanpa ada perbedaan. Apabila

5. Suko Wiyono, 2010, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang, Unidha Press, h. 16.

6. Imam Maksud, 2021, *Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila*, Jakarta, Lemhannas, h. 7.

7. Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, h. 114.

8. Loc.cit, h.8.

hukum dapat melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum akan memperoleh kewibawaan di mata dan di hati rakyat. Di samping itu, Nilai Keadilan menjadi faktor penting dalam mendorong terbentuknya sikap dan perilaku hidup setiap manusia Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, lebih mengutamakan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang terpinggirkan, miskin, lemah dan difabel. Nilai Keadilan ini menjadi dasar pemerataan pembangunan disetiap daerah dalam wilayah Negara Indonesia. Pembangunan di Indonesia, pada dasarnya adalah perwujudan semangat dari nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai keadilan, sehingga tujuan dan cita-cita negara yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, dapat tercapai, melalui kebersamaan dalam keberagaman.

Kebersamaan ini mendasari kepedulian terhadap kaum yang terpinggirkan, miskin, lemah dan difabel, terlebih pada masa pandemi ini, melalui rasa 'terpanggil' untuk menghadapi segala permasalahan dengan mengutamakan kepentingan bersama, dalam hal ini, kepentingan rakyat.

D. Implementasi Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan

Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan yang terdapat dalam jiwa manusia Indonesia, merupakan nilai-nilai yang tampak pada setiap aspek kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini tercermin dalam perilaku individu warga negara dan setiap individu penyelenggara negara, serta perilaku semua orang dalam hubungan antar warga dan antar warga dengan institusi negara, dalam budaya kerja yang terorganisasi, serta dalam pola komunikasi publik yang terbuka pada umumnya, maupun pembentukan, penerapan, dan penegakan kebijakan umum yang dituangkan dalam bentuk-bentuk hukum tertentu, (*the formulation, administration, and enforcement of public polities*), disertai dengan sistem keteladanan dan sistem tanggung jawab kepemimpinan yang efektif.⁹ Apabila nilai-nilai luhur Pancasila ini dibumikan dan dibudayakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penjabaran dan pembumian nilai-nilai luhur Pancasila ini, harus tercermin juga dalam iklim dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan, melalui perumusan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari AGHT baik

9..Jimly Asshiddiqie, 2020. Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h.63.

internal maupun eksternal. Menghadapi AGHT ini, diperlukan adanya kekuatan dari kemajemukan yang berlandaskan nilai-nilai keselarasan dan keadilan, dengan Pancasila sebagai perekat, pemersatu bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini.

E. ATHG dan Cara Mengatasi

Adanya era globalisasi ini, maka berbagai ancaman (ATHG) harus dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam. Terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan bangsa, diikuti perubahan pada organisasi negara, dan struktur pemerintahan, dan juga munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kultur baru, kultur yang berbeda dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Hal ini dapat menjadi penyebab hilangnya atau memudarnya nilai-nilai yang telah tertanam dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia.

Merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia yang majemuk untuk menghadapi perubahan akibat globalisasi ini, demi mempertahankan keberlanjutan bangsa Indonesia, sekaligus mempertahankan wilayah Indonesia demi kepentingan generasi berikutnya. Reaksi terhadap perubahan ini ditanggapi dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa ada kepedulian terhadap sesama. Hal ini akan menghambat serta merugikan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok, menimbulkan sikap dan perilaku saling tidak percaya, sehingga merusak nilai-nilai keselarasan dan keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang demikian cepat terpicu oleh situasi, menyebabkan setiap manusia melupakan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam dirinya dan dalam pribadi bangsa Indonesia.

Lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok, menimbulkan sikap egosime, bukan saja dalam kehidupan pribadi, namun juga yang menyangkut hubungan kelembagaan dan daerah, sehingga timbul ego-sektoral dan ego-regional. Tanpa disadari, egoisme ini memicu berbagai konflik sosial, yang mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Empat Konsensus Dasar, terabaikan karena egoisme tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan ini, dengan melakukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik, adalah berupa pembangunan di segala bidang yang menunjang kehidupan manusia-manusia; sedangkan pembangunan non fisik, dilakukan melalui pembangunan intelektual yang berkarakter khas bangsa Indonesia, yang mengandung Nilai-nilai Kebangsaan ini, khususnya Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan. Pembangunan

intelektual yang berkarakter bangsa Indonesia ini, merupakan suatu kerja keras, sehingga membutuhkan partisipasi individu dan/atau kelompok yang mau peduli terhadap keberlanjutan Negara dan Bangsa Indonesia.

Tantangan ini harus diatasi dengan membenahan di segala bidang, khususnya pendidikan, agar dapat menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang mulai memudar, melalui pemantapan pemahaman Pancasila dimulai dari usia dini, agar supaya melahirkan generasi baru yang cerdas dan berkarakter bangsa Indonesia.

Agar upaya ini dapat berhasil, maka diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menggali dan mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal;
2. Memberikan pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan pengenalan akan para pahlawan nasional dan jasa-jasanya yang membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka;
3. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan (religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan dan keadilan), dalam sikap dan perilaku, diawali dari usia dini dan dalam keluarga, terutama dalam kesadaran multikulturalisme;
4. Menjadikan keluarga sebagai soko guru dan tiang Negara melalui berbagai sosialisasi dan pendampingan, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan tangguh;
5. Mensyaratkan karakter yang telah teruji, bagi calon-calon pemimpin, agar pemimpin terpilih benar-benar merupakan manusia yang utuh, memiliki integritas dan berkarakter Pancasila dengan penghayatan serta penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan pribadinya, sebelum mencalonkan diri;
6. Memberikan pelatihan ber-sertifikasi kepada calon-calon legislatif dan eksekutif dalam pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan wawasan Nusantara;
7. Memberikan sanksi berat terhadap ketidakberanian menolak intervensi, kolaborasi dan/atau konspirasi yang jahat dan merugikan bangsa dan negara, terutama dalam penegakan hukum demi terwujudnya nilai keadilan;

Tindakan-tindakan ini diawali dari kesadaran dan kesediaan pemimpin yang sedang menjabat, untuk diuji secara komprehensif, baik pribadi maupun keluarganya melalui pola hidupnya.

F. Mengokohkan Ketahanan Nasional dalam Segala Bidang

Sosialisasi kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan ini, yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemahaman yang mendalam ini, menjadi suatu landasan yang kokoh dalam memperkuat diri, agar tidak terseret atau hanyut dalam arus perubahan yang mengikis jati diri bangsa Indonesia. Membangun kekuatan moral melalui pemahaman akan nilai religius dari masing-masing agama dan kepercayaan, dengan saling menghargai dan saling menghormati, sebagai pilar yang kokoh dalam mempertahankan wilayah dan keberlanjutan bangsa dan Negara Indonesia.

Pilar kokoh ini meliputi berbagai bidang kehidupan bangsa, terutama bidang ekonomi dan politik. Bidang ekonomi dengan kebijakan politik yang mengutamakan kepentingan rakyat, dapat membentuk keluarga-keluarga yang sejahtera dan tangguh. Ketangguhan keluarga-keluarga ini, membutuhkan strategi dalam ketahanan dan kemandirian. Ketahanan ini merupakan ketahanan nasional yang meliputi : ideologi, politik, konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan negara, sistem politik dalam negeri, pasca 23 tahun reformasi. Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, mengalami tantangan dan penentangan, dengan adanya nuansa ideologi lain, sehingga menghambat keberlangsungan pembangunan; kemudian, politik menjadi hambatan besar karena kemauan politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok, sehingga menghambat keterpaduan kerjasama dalam pemerataan pembangunan; sedangkan konstitusi yang mempunyai 'penjaga' yang berkualitas dan tangguh, ternyata mengalami degradasi karakter, sehingga konstitusi belum dapat dimaknai sebagaimana yang diharapkan walaupun telah mengalami empat tahap perubahan secara *adendum*, sehingga muncul wacana perubahan tahap kelima; demikian pula dengan penyelenggaraan pemerintahan negara yang belum terlaksana dengan baik, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, sebagai dampak dari karakter pemimpin yang tidak punya integritas dan tidak memiliki kesadaran akan jati diri bangsa; dan sistem politik dalam negeri yang memicu terjadinya konflik-konflik kelompok yang di cemarkan meluas dan mengancam integrasi Negara Indonesia. Ideologi, politik dan konstitusi ini merupakan tiga elemen yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tiga elemen ini tidak akan berguna, apabila faktor penentu nya yaitu : manusia, sebagai pelaku kebudayaan dan peradaban bangsanya, manusia-lah yang paling untuk melakukan tindakan penanggulangan masalah dalam kehidupan bersama-nya. Pendapat

Koentjaraningrat - pakar budaya - menyatakan bahwa :¹⁰ kebudayaan adalah segala bentuk hasil karsa, karya, dan rasa manusia yang mewujud kee dalam tiga unsur budaya, yaitu:

1. Sistem nilai budaya (*value system*), yang dalam perkembangannya menjadi lembaga sosial-budaya (*socio-cultural institution*) yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah perilaku dan perbuatan manusia dalam masyarakat bangsa itu;
2. “*Mindset*” berupa suatu kompleks “cara pandang berpola” dari manusia dalam bermasyarakat, yang mendasari perilaku yang khas dari masyarakat atau bangsa itu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan mereka. “*Mindset*” ini akan membentuk etos kerja, kesungguhan memegang prinsip, keuletan, dan disiplin dalam pemecahan masalah. “*Mindset*” ini bersifat unik dan khas masyarakat atau bangsa itu;
3. *Artefak* yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia yang merupakan keseluruhan total hasil fisik yang berasal dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat yang bersifat *tangible*.

‘*Mindset*’ ini, termasuk cara pandang bangsa kita dalam mendayagunakan lingkungan dan kekayaan alam kita, mengolahnya dengan kemajuan iptek, sehingga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa secara berkeadilan.

Di samping itu, landasan visioner kita adalah Wawasan Nusantara, yang meliputi segenap wilayah Indonesia dengan keberagaman budaya dan kearifan lokalnya, melalui sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati serta memperhatikan keseimbangan dengan alam lingkungannya, sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Bangsa Indonesia belum secara maksimal menerapkan Wawasan Nusantara ini sebagai cara pandang yang utuh dalam menandang kejahatan ATHG berupa terorisme, narkoba, dan penyelundupan lainnya sebagai musuh bersama yang dapat menghancurkan masa depan bangsa maupun suatu generasi bangsa.¹¹ Oleh karena itu, Wawasan Nusantara

10. Aliansi Kebangsaan Suluh Nuswantara Bakti, 2019, Menggalang Ketahanan Nasional, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, h. 51

11. Ibid, h.57

dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam mengembangkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia, untuk mengatasi ATHG.

Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam menggunakan segenap potensi yang ada, untuk kesejahteraan bangsa. Adanya partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia, dengan menggunakan 'mindset' yang ber-Wawasan Nusantara, akan mampu menghadapi ATHG, yang membahayakan keberlanjutan hidup bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan pemimpin nasional yang tangguh. Kemampuan tata kelola penyelenggaraan negara-bangsa Indonesia yang tangguh akan mampu menyelesaikan semua permasalahan ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan negara. Terlebih menghadapi arus generasi 4.0 terhadap sub sistem penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya bermuara pada pendayagunaan sumber daya alam yang ada. Pengokohan Ketahanan Nasional ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun 'ketahanan organisasional' (*organizational resilience*), yang didukung oleh 'kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual' yang kuat agar dapat memimpin bangsa Indonesia dalam membangun Ketahanan Nasional untuk mencapai cita-cita Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

G. Meningkatkan Kualitas Bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan diawali dari keluarga, yang telah mengalami pergeseran dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ke ranah ibu yang bekerja, maka pendidikan karakter pada usia dini, tidak lagi berada ditangan ibu, soko guru keluarga, tetapi beralih kepada 'pengasuh' sehingga pendidikan karakter ini tidak memadai, yang mempengaruhi perkembangan calon generasi penerus ini untuk seterusnya. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam sikap dan perilaku sehari-hari generasi muda ini, karena kurangnya pemahaman ibu dan pengasuh tentang nilai-nilai kebangsaan. Padahal nilai-nilai kebangsaan ini dimulai dari sikap dan perilaku terhadap sesama, oleh karena itu, peningkatan kualitas bangsa harus dengan mengokohkan pemahaman para ibu dan pengasuh tentang nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan pendidikan keluarga (*parenting*), dengan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dari kesadaran serta kesediaan keluarga untuk terlibat. Pembentukan manusia generasi penerus yang berkualitas dan tangguh dalam menghadapi ATHG dan perkembangan jaman, membutuhkan strategi yang masif dan terstruktur dengan inovasi yang kreatif. Hal ini perlu segera dilakukan sebelum ada satu generasi yang "lost", karena telah terbawa arus

globalisasi, dengan budaya asing yang tidak sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam dengan Wawasan Nusantara, tetap melekat pada Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa, yang tidak boleh kalah dengan arus globalisasi ini, di tambah dengan ancaman dari dalam yaitu bencana alam, pandemi, dengan berbagai dampaknya dalam semua aspek kehidupan. Kualitas manusia Indonesia, akan tercapai apabila ada kesadaran masyarakat-bangsa ini dalam menjaga, mempertahankan wilayah dengan semangat bela negara yang tidak kunjung padam, sehingga Nilai-nilai Kebangsaan beserta Empat Konsensus Dasar menjadi ‘bintang’ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai, dalam keberagaman, dengan saling mengendalikan diri, menghargai, menghormati dan memperhatikan serta mengutamakan kepentingan bersama, daripada kepentingan perorangan, kelompok maupun golongan. Hal ini menjadi dasar utama dalam kesiapan Indonesia menghadapi berbagai perkembangan dalam dunia global, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya ATHG sebagai masalah yang harus dihadapi dengan kekuatan kemajemukan bangsa Indonesia. Diperlukan keseriusan untuk mengatasi lunturnya nilai-nilai Pancasila, menipisnya toleransi diantara sesama warga, melemahnya rasa persatuan dan menurunnya ketahanan mental-spiritual bangsa Indonesia, merupakan ancaman serius bagi Ketahanan Nasional bangsa Indonesia¹²; dengan demikian diharapkan nilai-nilai keselarasan dan keadilan terimplementasi-kan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam bingkai Wawasan Nusantara, sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia, secara berkesinambungan dan terstruktur. Peningkatan kualitas bangsa ini dimulai dari pendampingan pada keluarga-keluarga muda (*parenting*), agar mampu mendidik generasi penerus bangsa dengan penuh kesadaran akan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan formal ini tidak akan berguna apabila tidak disertai pendidikan karakter bangsa pada usia dini.

B. Rekomendasi

12. Ibid, h. 111.

1. Perlu diadakan pelatihan tentang Wawasan Kebangsaan terhadap para aparatur pemerintah
2. Perlu dijadikan persyaratan (sertifikasi) untuk para calon legislatif
3. Perlu diadakan pelatihan bagi para pengurus partai politik
4. Perlu diberikan pendidikan kebangsaan bagi para tokoh agama di daerah-daerah.
5. Perlu dibuatkan modul pendidikan kebangsaan dan bela negara untuk masyarakat di daerah-daerah, secara terstruktur dan termonitor.
6. Perlu diadakan pendidikan Pancasila secara terus menerus kepada masyarakat.

Kesemuanya ini sebaiknya tersentral di Lemhannas.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Aliansi Kebangsaan Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Maksudi, Imam, 2021, Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila, Lemhannas, Juni 2021.

Soeprapto, 1996, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Citraluhur Tatamandiri.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa.

Warka, Made, 2011, *Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI*, Yogyakarta, Andi.

Widayati, Sri, 2009, *Wawasan Nusantara*, Jakarta, CV Pamularsih.

Wiyono, Suko, 2018, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang, Unidha Press.